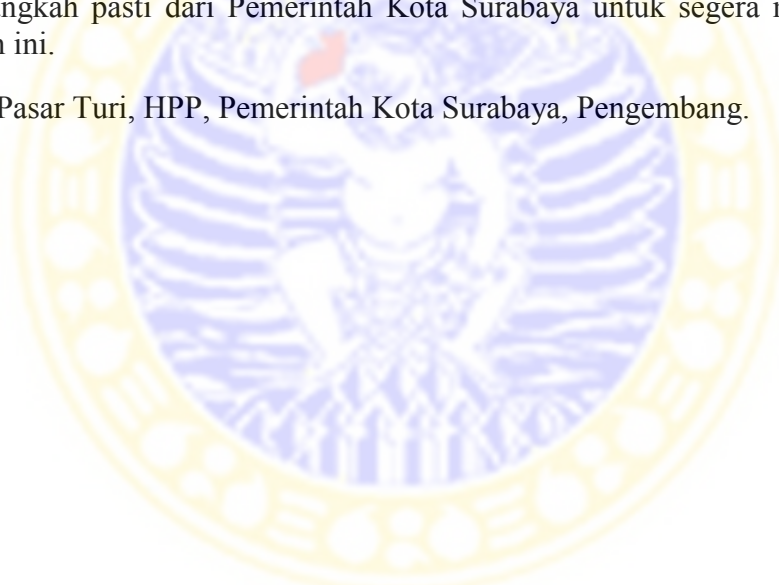


## ABSTRAK

Peristiwa kebakaran yang menghabiskan seluruh bangunan Pasar Turi telah menyisakan kenangan bagi semua orang, terlebih lagi para pedagang Pasar Turi yang telah sekian lama berjualan di tempat tersebut. Sejak terbakarnya pada tahun 2007 silam hingga tahun 2011 belum ada respon dan langkah dari Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun kembali Pasar yang menjadi *icon* dari kota Surabaya ini. Banyak alasan dan hambatan yang menjadikan terlambatnya pembangunan Pasar Turi ini, dan dari alasan inilah para pedagang sepakat untuk membentuk sebuah himpunan yang dinamakan Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Pasar Turi Surabaya. Hingga akhirnya pada tahun 2011 dimulailah pembangunan Pasar Turi ini dengan jangka waktu 2 tahun yang akan selesai pada bulan Oktober 2013. Namun hingga saat ini pembangunan tersebut belum juga terselesaikan oleh karena itu disinilah tujuan dan tugas yang harus diemban oleh HPP yaitu untuk memperjuangkan hak hak para pedagang atas keterlambatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengembang, selain itu HPP juga menunggu langkah pasti dari Pemerintah Kota Surabaya untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

*Kata Kunci:* Pasar Turi, HPP, Pemerintah Kota Surabaya, Pengembang.



## ABSTRACT

The wildfire, that had been extinguished all over the buildings in Pasar Turi, had left so much remembrance to everyone moreover to the merchants in Pasar Turi who worked there for long time. Since the wildfire incident in 2007 until 2011, there was no respond from the Governance of Surabaya to rebuild the market which has been the icon of Surabaya. There were many reasons and obstacles that made the reconstruction hampered and because of this, the merchants agreed to form a community named “Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Pasar Turi Surabaya”. In 2011 the reconstruction of Pasar Turi finally began and it would be done for two years in October 2013. But until now the reconstruction has not done yet, therefore this is the objective and also the duty that must be carried by PHP, to contend the rights of the merchats because of the retardation caused by the developers. Furthermore, the HPP also claimed to the Governance of Surabaya and aslo the developers to be responsible of this retardation.

*Keywords* : Pasar Turi, HPP, Governance of Surabaya, Developer.

